

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karesidenan merupakan suatu pembagian administratif dalam sebuah provinsi. Biasanya dalam suatu karesidenan, terdapat beberapa kabupaten/kota. Meski pembagian administratif berdasarkan karesidenan sekarang ini sudah tidak digunakan, namun atas tujuan tertentu atau untuk mempermudah administrasi biasanya masih menggunakan wilayah eks-karesidenan. Untuk wilayah karesidenan pati sendiri terdapat 6 kabupaten/kota yang meliputi: Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus dan Jepara. Banyaknya desa di Karesidenan Pati berjumlah 1539 desa, terdiri dari 273 desa di Grobogan, 271 desa di Blora, 287 desa di Rembang, 401 desa di Pati, 123 desa di Kudus dan 184 desa di Jepara. Banyaknya jumlah desa di eks-Karesidenan pati tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua desa menerapkan transparansi pelaporan keuangan dana desa.

Perkembangan tentang dana desa kini telah menjadi isu yang menarik dan sering dibahas oleh masyarakat maupun para pakar saat ini. Respon masyarakat tentang otonomi desa yang berkembang sangat pesat ini menyebabkan permintaan yang tinggi akan tata kelola pemerintah yang baik (good government governance). Untuk mewujudkan good government governance, salah satu upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan transparansi atas pengelolaan keuangan.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan adanya dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan juga di harapkan mampu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (UU No. 6, 2014).

Alokasi dana desa dalam APBN tahun 2015 di seluruh Indonesia berjumlah Rp 9.066,2 miliar kemudian ditambah lagi dalam APBN-P tahun 2015 menjadi Rp 20.766, 2 miliar untuk 74.093 desa (Gayatri, Latrini dan dkk, 2017). Dalam APBN tahun anggaran 2016, dana desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dan pada tahun anggaran 2017 dana desa kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun. Pengalokasian dana desa disalurkan ke masing-masing provinsi kemudian ke kabupaten/kota oleh Kementerian Keuangan. Untuk Karesidenan Pati pada tahun 2017, dana desa dialokasikan kepada 1539 desa untuk 6 kabupaten/kota seperti dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1

Anggaran Dana Desa Tahun 2017 di Karesidenan Pati

Kabupaten/kota	Jumlah (Rp)
Grobogan	248.195.231.000
Blora	229.733.837.000
Rembang	229.010.130.000
Pati	365.454.541.000
Kudus	117.966.044.000
Jepara	190.273.424.000
Jumlah	1.380.633.207.000

Sumber: Permenkeu No. 226/PMK.07/2017

Pengelolaan dana desa diharapkan mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang makmur, adil dan sejahtera sehingga menjadikan desa yang mandiri, maju, kuat dan demokratis (Gayatri dan Latrini dkk, 2017). Gayatri dan Latrini dkk (2017) menyatakan bahwa pada era demokrasi masyarakat menuntut pemerintahan yang bertanggung jawab, bersih dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah semakin tinggi.

Penerapan transparansi di pemerintahan desa diharapkan mampu menekan adanya asimetri informasi antara pemerintah desa dengan pihak masyarakat (Wintari dan Suardana, 2018). Kemudahan akses informasi yang di berikan oleh pemerintah desa merupakan hal penting yang kini di perhatikan masyarakat. Transparansi merupakan konsep yang mencakup suatu peristiwa atau suatu kejadian (keterbukaan informasi tentang input, output serta outcome), transparansi proses (keterbukaan informasi tentang suatu transformasi yang telah berlangsung antara input, output serta outcome), transparansi real-time (informasi yang akan dirilis segera dalam waktu dekat), atau transparansi retrospektif (Hood (2007) dalam Wintari dan Suardana, 2018). Penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Faktor pertama yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah tekanan eksternal. Tekanan eksternal adalah suatu tekanan yang muncul dari pihak di luar pemerintahan desa seperti peraturan (regulasi), masyarakat, eksekutif maupun pihak luar lainnya (Wintari dan Suardana, 2018). Adanya tekanan eksternal pada pemerintah desa menyebabkan praktik-praktik pemerintah desa bersifat formalitas agar mendapat legitimasi. Hasil penelitian

terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Wintari dan Suardana (2018), Noprizal (2017), Umaroh (2017), Yesnita (2016), Putra (2016), Andriyani (2016) dan Kasfauzi (2016) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, dimana peraturan pemerintah menjadi landasan diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintahan desa adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang bertujuan untuk memberi keyakinan kepada masyarakat tentang tiga tujuan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi (Wintari dan Suardana, 2018). Pengendalian internal mencakup lima elemen yang terdiri dari penilaian resiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, aktifitas pengendalian serta pengawasan (Arens (2008) dalam Wahyuni, 2016). Semua elemen tersebut digunakan pemerintah desa untuk mencapai tujuannya. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Wintari dan Suardana (2018) dan Putra (2016) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi dimana pemerintahan desa mengalami ketidakpastian yang

disebabkan oleh pengaruh dari luar pemerintahan desa, seperti terjadinya perubahan peraturan secara mendadak, adanya ketidaksamaan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, mutasi staf perangkat desa yang cepat dan lain sebagainya (Wintari dan Suardana, 2018). Pemerintah desa dituntut oleh pihak luar untuk menyesuaikan diri secara cepat terhadap kondisi yang ada, baik dalam praktik dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan maupun dalam operasionalnya. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Wintari dan Suardana(2018), Noprizal (2017), Umaroh (2017) dan Putra (2016) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan Andriyani (2016) dan Kasfauzi (2016) menunjukkan hasil bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Faktor keempat yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu tindakan dalam sebuah organisasi yang terkait dengan profesionalisme. Perubahan komitmen pada sebuah organisasi maupun pemerintahan dapat berimbas pada masalah karakter maupun integritas suatu organisasi (Dacin et al, (2002) dalam Wintari dan Suardana, 2018). Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Wintari dan Suardana (2018) menunjukkan bahwa komitmen

organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Faktor Kelima yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang memudahkan untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Andriyani, 2016). Laporan keuangan seharusnya di sajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dimengerti serta tersedia untuk siapa saja yang tertarik dan mau memahaminya. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Andriyani (2016) dan Kasfauzi (2016) menunjukkan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor terakhir yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Menurut beberapa pakar, kompetensi sumber daya manusia adalah dasar dari karakteristik seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai pemerintah desa yang kurang mempunyai pengetahuan tentang pekerjaannya akan tersendat-sendat dan mengakibatkan pemborosan waktu dan juga tenaga. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Umaroh (2017) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) yang menunjukkan hasil bahwa Kompetensi

Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Banyaknya kasus tentang kurangnya transparansi laporan keuangan menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya dilakukan di Indonesia, termasuk pada pemerintahan desa. Padahal dana desa diberikan untuk memberdayakan masyarakat serta mensejahterakan masyarakat. Transparansi dibutuhkan agar masyarakat mempunyai akses untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa semakin lemah.

Pada bulan Januari 2018, puluhan pemuda Desa Semirejo, Kecamatan Gembong yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Desa mendatangi Kantor DPRD Pati. Mereka mengadukan Kepala Desa Semirejo Triyono, yang diduga melakukan penyelewengan dana desa. Puluhan pemuda menggelar audiensi dengan wakil rakyat lantaran selama ini pemuda desa Semirejo melihat bahwa pemerintah desa tidak transparan terkait dana desa. Bahkan pemuda desa melihat banyak hal-hal yang dicurangi oleh pemerintah desa. Penyelewengan yang dilakukan di antaranya adalah pengelolaan dana PAM SIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang tidak transparan, penyewaan aset desa yang dilakukan pemerintah desa tanpa melakukan tahapan lelang dan tidak dengan tahapan yang seharusnya. Hal serupa pun terjadi di desa Undaan Tengah Kudus, Sofyan selaku ketua RW 2 menginginkan adanya transparansi terhadap laporan pertanggungjawaban APBDes di desa Undaan Tengah. Namun dirinya

merasa dipersulit ketika hendak meminta buku APBDes dari pihak pemerintah desa, dikutip dari murianews.com.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wintari dan Suardana (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.” Dengan menggunakan desain penelitian eksperimen pada Pemerintahan Daerah Provinsi Bali yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Denpasar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, periode penelitian dan variabel penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu Karesidenan Pati pada tahun 2019. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan dua variabel, yaitu Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wintari dan Suardana (2018) peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, salah satunya adalah Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Aksesibilitas laporan keuangan sebelumnya sudah diteliti oleh Kasfauzi (2016) dan Andriyani (2016), keduanya menunjukkan hasil jika Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan pelaporan keuangan. Variabel kedua yang ditambahkan oleh peneliti adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, sebelumnya kompetensi sumber daya manusia telah diteliti oleh Umaroh (2017) dan Putra (2016). Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Umaroh (2017) menunjukkan hasil jika kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) yang menunjukkan hasil jika kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Oleh karena itu, dengan penambahan variabel ini peneliti berharap agar penelitian ini bisa lebih luas lagi dan penelitian tentang penerapan transparansi pelaporan keuangan ini semakin berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini peneliti melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, KOMITMEN ORGANISASI, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Eks Karesidenan Pati)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel dependen dengan variabel independen yang meliputi tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi, aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia. Objek penelitian ini adalah Kepala desa, Sekretaris desa dan Kaur Keuangan di pemerintahan desa se-eks karesidenan pati yang terlibat

dalam proses penerapan transparansi pelaporan keuangan. Lokasi penelitian ini adalah Karesidenan pati.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
3. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
5. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi:

1. Peneliti/Akademisi

Bagi peneliti berguna untuk menambah pengetahuan/wawasan dan referensi mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan agar memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi, aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan referensi bagi pihak pemerintah desa mengenai tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi, aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

3. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi, aksesibilitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.